
Usaha Kelapa Sawit di Kuala Buayan, Kalimantan Barat

Ganggas Prakosa Sigit Wibowo

Staf Magang Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada
Email: ganggas.prakosa.sigit.wibowo@mail.ugm.ac.id

Abstract

This article explores farmers rationales for adopting oil palm cultivation, which replaced rubber as a cash crop in Sengkuang Daok, West Kalimantan. Using qualitative analysis, I found reasons farmers chose oil palm as a new commodity—first, local knowledge of the surrounding environment. Second, the social pressure to live a decent life in the new era emerged from the values of modernity. This article is based on my research from February to the end of April 2019 using qualitative methods through participant observation, in-depth interviews, and photographic documentation. The results show that palm oil adoption is driven by environmental pressures due to weather fluctuations and local people's perception of the value of "progress and prosperity".

Keywords: *palm oil, smallholder farmer, environmental knowledge, economic benefit, infrastructure development*

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi alasan petani dalam mengadopsi budidaya kelapa sawit, yang menggantikan karet sebagai tanaman komersial di Sengkuang Daok, Kalimantan Barat. Dengan menggunakan analisis kualitatif, saya menemukan alasan-alasan petani memilih kelapa sawit sebagai komoditas baru—pertama, pengetahuan lokal tentang lingkungan sekitar. Kedua, tekanan sosial untuk menjalani kehidupan yang layak di era baru yang muncul dari nilai-nilai modernitas. Artikel ini didasarkan pada penelitian saya sejak Februari hingga akhir April 2019 dengan menggunakan metode kualitatif melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi foto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi kelapa sawit didorong oleh tekanan lingkungan akibat fluktuasi cuaca dan persepsi masyarakat lokal terhadap nilai "kemajuan dan kemakmuran".

Kata Kunci: *kelapa sawit, petani kecil, pengetahuan lingkungan, keuntungan ekonomi, pembangunan infrastruktur*

Pendahuluan

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat sudah marak semenjak awal tahun 1980-an (Semedi dan Bakker 2014, 379). Pada 2017, luas kebun kelapa sawit di Kalimantan Barat mencapai 1.497.841 hektar (Kementerian Pertanian 2018, 214). Ekspansi tersebut didorong oleh meluasnya permintaan pasar global terhadap suplai minyak nabati sawit yang juga mendorong lajunya ekspansi perkebunan sawit di sejumlah wilayah di Asia Tenggara. Hal tersebut menstimulasi perdagangan kelapa sawit, investasi lebih lanjut, dan meluasnya akuisisi lahan. Saat ini, Indonesia dan Malaysia merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di mana produksinya mencapai 80% dari keseluruhan produksi minyak sawit di seluruh dunia (Colchester dan Chao 2011, 3).

Sejak tahun 1990 pemerintah menggunakan mekanisme baru dalam proses akuisisi lahan bernama NES (*Nucleus Estate Schemes*) dan skema ini masih berlaku sampai sekarang. Skema ini membagi lahan menjadi dua, yakni lahan inti yang dikelola langsung oleh perusahaan dan lahan plasma yang digarap sendiri oleh petani lokal (Semedi dan Bakker 2014, 380). Petani lokal yang berpartisipasi dalam skema ini akan menyerahkan sejumlah besar lahannya kepada perusahaan dan sebagai gantinya mereka akan mendapatkan sebagian lahan plasma dan tempat tinggal di desa transmigrasi yang disediakan oleh perusahaan.

Ekspansi kelapa sawit didorong kuat oleh perusahaan pemerintah dan swasta untuk keperluan pembangunan ekonomi daerah. Seiring berjalannya waktu, petani-petani lokal mengadopsi kelapa sawit secara mandiri (Gatto, Wollni, dan Qaim 2015, 292-303). Menurut data BPS 2019, jumlah luas perkebunan sawit di Indonesia didominasi oleh perkebunan besar swasta dengan persentase 54,42% dan diikuti oleh perkebunan rakyat dengan jumlah 41,35% serta perkebunan besar negara sebesar 4,23% (BPS 2019, 11). Padahal, pada tahun 2010 persentase luas perkebunan sawit didominasi oleh perusahaan besar swasta dengan angka 53,94 % dan diikuti oleh perkebunan rakyat sebesar 37,95 % dan perkebunan besar negara sebesar 8,11% (BPS 2010, xviii). Angka ini menunjukkan ekspansi yang signifikan untuk perkebunan rakyat, dan cenderung stagnan untuk perkebunan besar swasta. Maka dari itu, penting untuk meneliti lebih lanjut tentang siapa petani-petani kecil ini dan mengapa mereka mulai membudidayakan kelapa sawit.

Sebelum tahun 2010, penduduk lokal Dayak dan Melayu di Desa Kuala Buayan, Kalimantan Barat dikenal sebagai masyarakat peladang dan pekebun karet (*hevea brasiliensis*). Menurut Dove (1993, 136-147), penduduk Dayak Kalimantan mengadopsi karet jenis *hevea brasiliensis* sebagai strategi tambal sulam, ketika produksi padi ladang tidak mencukupi kebutuhan subsisten di musim kemarau. Getah karet yang disadap dijual ke pasar lokal dan digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di saat musim lapar pada bulan-bulan tertentu bertepatan dengan musim kemarau. Pada awal adopsi karet ini, penduduk lokal mengintegrasikannya dengan lahan mereka sendiri yang umumnya ditanami dengan kebun buah-buahan, meskipun pada awalnya perusahaan karet merencanakan penanaman komoditas ini secara monokultur (Dove 1998, 382-396). Hari ini sudah menjadi hal yang biasa bagi para petani lokal untuk mengonversi kebun-kebun mereka sendiri menjadi kebun kelapa sawit dan menjualnya ke perusahaan sawit yang berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal mereka.

Hubungan antara petani lokal dengan perusahaan kelapa sawit bisa saling

menguntungkan bagi kedua belah pihak. Melalui skema NES, perusahaan bukan hanya mengambil sebagian lahan milik penduduk lokal tetapi juga menawarkan berbagai keuntungan ekonomi kepada warga yang berpartisipasi. Akan tetapi, pertimbangan mengenai adopsi kelapa sawit bukan serta merta berdasarkan pertimbangan keuntungan ekonomi yang menyertainya tetapi juga meliputi pertimbangan ekologis, seperti halnya strategi tambal sulam bagi petani karet ketika musim lapar tiba. Fokus saya jatuh pada perkebunan kelapa sawit yang terhampar luas di Desa Kuala Buayan, khususnya di Dusun Sengkuang Daok. Jika penduduk lokal hidup secara berkelanjutan dengan membudidayakan pohon karet dan musim lapar telah menjadi kisah masa lalu, lantas mengapa mereka menerima introduksi kelapa sawit oleh perusahaan luar?

Artikel ini hendak mengungkap pertimbangan ekonomi dan ekologi yang ada di kalangan petani Dusun Sengkuang Daok dalam menerima introduksi kebun kelapa sawit oleh PT BHD (Bina Harapan Desa) dari penelitian etnografi selama dua bulan di Dusun Sengkuang Daok, Desa Kuala Buayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sejumlah wawancara mendalam saya lakukan kepada kepala dukuh, sekretaris desa, kepala RT, pemilik lahan, buruh sawit, dan manajer perusahaan. Saya juga melakukan wawancara mendalam dengan 19 informan dari beragam latar belakang usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Kepada mereka, saya berbincang mengenai kelebihan dan kekurangan komoditas kelapa sawit dibandingkan dengan karet *hevea* dari sisi ekonomi maupun ekologi. Selain itu, topik pembicaraan kami menyangkut siklus hidup dusun dalam waktu satu tahun, bagaimana asal mula tumbuhan dagang kelapa sawit masuk di desa Kuala Buayan, dan pandangan awal warga desa terhadap komoditas tersebut. Untuk memotret gambaran kondisi ekonomi rumah tangga, saya menanyakan seputar pekerjaan, penghasilan, dan bagaimana mereka membelanjakannya. Terdapat tiga kategori rumah tangga di dusun ini, yaitu rumah tangga yang tergolong tunakisma, mempunyai sedikit lahan, dan mempunyai banyak lahan. Khusus untuk memahami secara garis besar pengaruh kelapa sawit terhadap kebudayaan Melayu dan Dayak di Kalimantan Barat, saya melakukan kajian pustaka.

Petani dan Pertimbangan Mengadopsi Sawit

Penelitian oleh Colchester dkk menunjukkan adanya intimidasi dari perusahaan terkait dengan proses akuisisi lahan kelapa sawit (2006, 78-135). Di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pekanbaru, akuisisi lahan oleh sejumlah perusahaan memunculkan konflik karena warga diintimidasi pegawai negeri dan militer serta merasa dirugikan oleh pihak perusahaan. Warga menuntut pihak perusahaan mengembalikan lahan plasma yang telah dijanjikan dan mengizinkan mereka membudidayakan kebun sawit secara mandiri (Ibid). Di Kecamatan Meliau, petani lokal enggan menyerahkan lahannya karena ragu dan tidak familier dengan kelapa sawit sehingga menyebabkan perusahaan kekurangan input lahan dan tenaga kerja. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan mendatangkan tenaga kerja dari Jawa sebagai contoh bahwa mereka bisa hidup makmur jika bekerjasama dengan perusahaan. Jika cara ini gagal, perusahaan akan menggunakan ancaman dan intimidasi melalui sejumlah elite lokal (Semedi dan Bakker 2014, 381).

Sementara itu, tidak semua warga menolak ekspansi kelapa sawit. Studi kasus di

Kabupaten Bungo, Jambi oleh Feintrenie, Chong, dan Levang (2010, 314) menunjukkan bahwa, petani setempat lebih memilih mengkonversi kebun karet mereka menjadi perkebunan kelapa sawit karena karakteristik teknis tanaman kelapa sawit yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, keuntungan yang tinggi terhadap investasi, dan kemudahan akses terhadap kredit bank serta membuka banyak lapangan pekerjaan di luar perkebunan. Studi kasus lain mendeksripsikan bahwa secara garis besar di daerah Jambi, kelapa sawit menyumbang pengeluaran terbesar terhadap konsumsi rumah tangga, termasuk pangan dan non-pangan (Kubitza dkk. 2018, 114). Area lahan sawit memang lebih luas daripada kebun karet, akan tetapi kebutuhan tenaga kerjanya lebih sedikit, sehingga warga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan mengakumulasi lahan (Ibid). Penelitian Potter dan Badcock (2007, 176-178) mengenai introduksi kelapa sawit oleh PT SIA milik Malaysia di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menunjukkan tiga dari lima desa di Kecamatan Parindu, bekerjasama dengan perusahaan karena keuntungan ekonomi, berbagai tawaran pekerjaan baru dalam perusahaan, serta pembangunan jalan. Sementara, dua desa lainnya memilih lebih berorientasi kepada karet karena harganya lebih tinggi jika dibandingkan dengan sawit. Di Sarawak, Malaysia terjadi penurunan luas ladang yang disebabkan oleh ekspansi kelapa sawit, lada, dan karet. Di Desa Niah, misalnya, kebanyakan penduduk enggan untuk mengkonversi ladang menjadi perkebunan kelapa sawit karena biaya operasional tinggi, sedangkan input tenaga kerja relatif rendah dan keuntungannya dinilai belum jelas. Meskipun begitu, opsi konversi ke kelapa sawit masih dibuka jika di masa depan kelapa sawit dapat meningkatkan penghasilan mereka. Di Desa Muyang dan Ulat, sistem perladangan sudah ditinggalkan penduduk desa, karena bekerja dengan perusahaan skala besar (Mertz, Egay, Bruun, dan Colding 2013, 116-117).

Di samping soal meningkatkan jumlah pendapatan, banyak penelitian mengkritik efek perkebunan kelapa sawit terhadap tanah warisan penduduk lokal. Sirait (2009, 63) misalnya, menunjukkan bahwa kelapa sawit mengaburkan identitas Suku Dayak dan Melayu di Kalimantan Barat. Penduduk yang sebelumnya bertahan hidup dengan berorientasi pada produksi subsisten di ladang, *tembawang*, dan menyadap karet, kini harus bergantung pada pasar dan pekerjaan di luar desa. Jurang kesenjangan juga meningkat karena kesejahteraan sangat ditentukan oleh hasil panen sawit pribadi. Li (2015, 18) menyebutkan permasalahan tunakisma semakin meningkat di kalangan Suku Dayak dan Melayu, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai ladang untuk menumbuhkan bahan pangan dan tidak bisa menyadap karet milik kebun orang lain seperti dahulu kala. Hilangnya biodiversitas hutan juga menyebabkan mereka kehilangan akses tempat berburu dan mencari tumbuh-tumbuhan hutan (Ibid.). Terlepas dari opini para ahli, berbagai konflik yang timbul karena pembangunan kelapa sawit jarang dikarenakan penolakan warga akan tetapi karena lemahnya manajemen perusahaan dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap institusi mereka (Feintrenie, Chong, dan Levang 2010, 381). Pernyataan tersebut didukung oleh Cholchester, dkk. (2006, 11);

“[Jika] dilakukan dengan benar, kelapa sawit seharusnya menambah pendapatan dan lapangan kerja bagi komunitas lokal. [Tetapi kalau] dilakukan dengan salah, perusahaan kelapa sawit dapat menyebabkan alienasi lahan, hilangnya penghidupan, konflik-konflik sosial, dan eksploitasi relasi tenaga kerja, serta degradasi ekosistem”.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan rasionalitas para petani dalam menolak dan menerima kelapa sawit. Meskipun begitu, para peneliti tampaknya menggunakan sudut pandang ekonomi formalis yang menganggap bahwa tingkah laku memilih dan tingkah laku mencari keuntungan bersifat universal (Cook 1970, 776 dalam Sairin dkk 2001, 96). Upaya mengkaji rasionalitas adopsi kelapa sawit oleh penduduk lokal dikemukakan Nash bahwa:

“Pilihan ekonomi yang rasional dalam masyarakat petani mengikuti aturan umum pemaksimalan yang sama dengan aktivitas ekonomi di mana saja dan kapan saja” akan tetapi studi mengenai ekonomi petani tidak harus dikurung dalam bahasa abstraksi analisis ekonomi formal. Petani tidak harus kehilangan keuntungan skala kecil dengan mengikuti tren konstruksi harga di level model kerangka universal, melampaui ruang dan waktu, untuk keuntungan luwes yang meragukan dan manipulasi yang mudah.” (Cook 1970, 777 dalam Sairin dkk 2001, 98)

Singkatnya, variabel ekonomi bukan satu-satunya penentu pilihan rasionalitas petani dalam mengambil sebuah keputusan, karena terdapat variabel lainnya, seperti kondisi alam, aktivitas pertanian, pesta, dan lain sebagainya (Sairin dkk 2001, 99).

Artinya, pertimbangan ekologis juga memainkan peran dalam menentukan sikap petani untuk mengadopsi atau menerima introduksi suatu tanaman dagang tertentu dalam sistem pertanian mereka. Sebagai contoh petani perbukitan Kollis, India memilih untuk menanam tapioka (singkong) berdasarkan tren pasar global dan kondisi cuaca lingkungan sekitar (Finnis 2006, 363). Petani daerah Oomordikadu yang tinggal di perbukitan Kollis, mengandalkan prediksi curah hujan dalam setahun untuk memastikan hasil panen yang melimpah. Akan tetapi, curah hujan di wilayah ini kerap tidak menentu dalam beberapa tahun, sehingga hasil panen mereka berkurang. Untuk mengatasinya, petani Oomordikadu mengadopsi tapioka yang tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan siklus curah hujan.

Penelitian Netting, Stone, dan Stone (1989, 315) menjelaskan adopsi tanaman dagang oleh petani Kofyar di Nigeria berupa taro, padi-padian, kacang-kacangan, dan sorgum karena tekanan populasi dan menyempitnya luas hutan untuk mempraktikkan pertanian ladang berpindah. Hal ini mengindikasikan adanya kesadaran penduduk lokal terkait dengan hambatan-hambatan ekologis untuk memenuhi kebutuhan subsistensi. Sementara Laney dan Turner (2015, 811-826) mendeskripsikan bahwa para petani di Timur Laut Madagaskar meningkatkan produksi pangan berupa beras *tavy* karena penghasilan dari produk kopi dan vanilla tidak mencukupi. Di samping itu, beras *tavy* lebih tahan terhadap perubahan cuaca dan hama burung. Pilihan untuk mengintensifkan produksi pangan subsisten juga menghambat mereka untuk menambah jumlah tenaga kerja ke sektor perkebunan tanaman dagang. Studi lain dikemukakan oleh Laris dan Foltz (2014, 869-870) mengenai petani Afrika Barat yang mengadopsi katun sebagai tanaman dagang agar bisa mendapatkan pinjaman kredit terhadap pupuk dan akses teknologi, sementara jagung tetap menjadi tanaman subsisten utama daerah tersebut. Di Kalimantan Barat sendiri, Dove (1994, 392-393) mengemukakan bahwa, domestikasi karet jenis *hevea* oleh suku Dayak merupakan usaha mereka untuk bertahan dalam persaingan dagang hasil hutan non kayu dalam pasar global ketika karet hutan sudah langka untuk didapatkan. Peralihan karet hutan ke karet jenis *hevea* mampu membuat penduduk lokal menghalau

klaim orang asing atas sumber daya karet lokal dengan lebih efektif dibandingkan jika mereka menanam karet hutan.

Dari beberapa studi kasus di atas dapat kita lihat bahwa domestikasi tanaman dagang merupakan sebuah strategi petani untuk memperbesar jumlah produksi mereka guna mencukupi kebutuhan subsisten, serta menjadi basis untuk bertahan dalam perdagangan internasional. Selain itu, bahwa pilihan petani dalam mengadopsi tanaman dagang yang dibawa oleh investor asing bukan hanya dipengaruhi oleh variabel ekonomi. Persepsi penduduk lokal terhadap lingkungannya juga mempengaruhi tindakan petani dalam mengambil keputusan. Persepsi ini meliputi apakah lingkungan yang ada masih memiliki ketahanan untuk menopang kebutuhan subsisten yang dibutuhkan sekarang dan di masa depan. Dalam tulisan ini saya akan menganalisis latar belakang keputusan mengapa petani di Dusun Sengkuang Daok bersedia menerima introduksi kelapa sawit oleh perusahaan.

Introduksi Kelapa Sawit di Desa Kuala Buayan

Introduksi kelapa sawit di kecamatan Meliau baru bermula pada tahun 1980 ketika perusahaan milik pemerintah bernama PT Perkebunan Nusantara XIII memperoleh konsesi lahan dari PT NV Kapoewas—sebuah perusahaan perkebunan karet Belanda yang didirikan tahun 1930 yang sudah ditinggalkan (Rufinus dkk, dalam Semedi, 2014, 238). Satu dekade kemudian, pada 1991, PT BHD (Bintang Harapan Desa) mulai didirikan di tepi sungai Mayam dan memperoleh HGU (Hak Guna Usaha) seluas 326.6 hektar lahan inti dan 1000 hektar lahan plasma melalui skema NES (*Nucleus Estate Scheme*).¹ Berselang hampir dua dekade, atau pada 2015, perusahaan telah memperluas kebun sawitnya menjadi 1771.06 hektar lahan inti dan 6840 hektar lahan plasma (Ibid).

Dikisahkan bahwa awal mula berdirinya perusahaan ini tidak begitu lancar. Pak Ringgo, manajer bidang pengolahan limbah PT BHD menjelaskan bahwa warga dapat menyerahkan lahannya melalui registrasi kepada satgas (satuan petugas) yang merupakan Tumenggung Adat setempat yang ditunjuk oleh perusahaan. Satgas akan mencatat penyerahan lahan oleh warga dan mengirimkan laporannya kepada perusahaan. Akan tetapi, dalam praktiknya satgas banyak yang melakukan kolusi dengan meregistrasi lahan warga yang telah diserahkan atas nama dirinya sehingga banyak warga tidak mendapatkan luas lahan yang semestinya mereka dapatkan. Sebaliknya, banyak satgas yang tiba-tiba mendapatkan jumlah *kapling* yang banyak. Warga sendiri menyerahkan lahannya secara sukarela. Meskipun warga tidak menunjukkan resistensi, tetapi pada waktu itu warga juga tidak terlalu menganggap penting perusahaan sawit tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Lesley (2005) bahwa dibandingkan dengan karet, sawit dipandang belum begitu jelas keuntungannya. Warga merasa antusias ketika proses pembabatan lahan karena mereka akan mendapatkan bayaran berupa uang langsung, tetapi menjadi kurang antusias terhadap penanaman kelapa sawit karena buah sawit baru dapat dipanen setelah tiga tahun.

Permasalahan pasokan tenaga kerja diatasi oleh perusahaan dengan mendatangkan migran dari Jawa, NTT, dan Bali serta menempatkan mereka di desa-desa Trans (Semedi dan Bakker 2014, 380). Para migran justru memiliki pandangan yang sebaliknya dibandingkan warga setempat. Mereka menganggap kelapa sawit sebagai komoditi yang

1 <http://esawit.sanggau.go.id>.

dapat menjanjikan penghasilan yang lebih besar. Dan karena mereka mampu membudidayakan kelapa sawit dengan baik, konsekuensinya mereka mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi daripada penduduk lokal sehingga mampu membangun rumah yang lebih baik dan membeli berbagai macam alat elektronik serta kendaraan. Pada akhirnya banyak warga lokal yang tertarik dengan komoditi ini dan bersedia menyerahkan lahannya.

Proses akuisisi melibatkan kerja sama dengan pemerintahan daerah di mana petani lokal dikenai peraturan “Serah Kebun”. Peraturan ini mengharuskan para petani menyerahkan lahan sebesar 7,5 hektar lahan kepada perusahaan melalui skema NES. Sebagai gantinya, warga akan menerima lahan sawit seluas dua hektar untuk dibudidayakan dan kompensasi selama tiga tahun serta pinjaman sebesar 22 juta rupiah untuk mengelola kapling hingga menghasilkan buah pertamanya. Sisa lahan 0,5 hektar digunakan untuk membuat perumahan di desa transmigran, dan 2,5 hektar untuk kebun inti serta 2,5 hektar lagi untuk kebun plasma milik transmigran.

Pengetahuan Lingkungan dan Siklus Pertanian Satu Tahun di Sengkuang Daok

Bagi penduduk Sengkuang Daok, keamanan lingkungan dipahami dalam konteks pengendalian musim hujan dalam setahun. Ladang memanfaatkan air dari musim hujan sebagai sumber pengairan karena kontur tanahnya yang landai. Maka dari itu, ketika ladang kosong di musim kemarau atau musim lapar tiba (Agustus hingga November), masyarakat akan menyadap karet (*noreh*) untuk mencari penghasilan. Prediksi musim hujan menjadi kunci pengetahuan pertanian dan ekologis yang menjadi dasar pertimbangan petani untuk membuat keputusan dalam menanam, memanen, dan pilihan-pilihan ekonomis lainnya. Dalam pertanian ladang, penduduk Sengkuang Daok membentuk ladangnya berada di daerah yang landai dan berawa (*paya*) serta mengandalkan musim hujan untuk irigasi, sehingga hanya bisa membudidayakan padi pada bulan-bulan tertentu ketika air tersedia. Model perladangan ini mulai diadopsi ketika area-area sekitar lereng perbukitan atau daerah “*mungguk*” sudah didominasi dengan kelapa sawit. Hal ini mengakibatkan luas area ladang semakin menyempit.

Penduduk memahami bahwa rawa yang mereka gunakan untuk pertanian lahan basah mengandung asam tinggi sehingga kurang subur, yang mempengaruhi hasil panen dan jumlah benih yang dapat disimpan untuk panen selanjutnya. Petani juga mempunyai mekanisme untuk mengatasi kekurangan benih, yakni ‘*nabung benih*’ atau menyimpan benih padi untuk musim tanam selanjutnya dengan cara membudidayakan padi jenis satu tahun. Padi jenis ini dipanen menggunakan *penyangi* atau ani-ani dengan cara memotong tangkai gabahnya satu-satu sehingga sengaja dibiarkan tumbuh hingga masa tanam selanjutnya.

Tekanan Lingkungan

Dalam budidaya karet dan sawah, penduduk berhadapan dengan perubahan cuaca akibat fluktuasi iklim yang menyebabkan curah hujan yang tak menentu. Di Sengkuang Daok, curah hujan yang tak menentu pada bulan Mei hingga Juli ini mengakibatkan jumlah panen padi di ladang menurun. Pada periode ini biasanya warga menyadap karet untuk dijual ke pasar. Selain itu, produksi sayur di sekitar ladang juga rawan terkena hama tikus

tanah. Fluktuasi cuaca ini juga menimbulkan kekeringan yang menyebabkan hama wereng dan walang sangit. Ketika hujan turun, kegiatan menyadap karet sulit dilakukan karena getah tergenang air. Di Desa Kuala Buayan sendiri, hujan turun setiap bulan November hingga Maret dengan intensitas tertinggi di bulan Februari hingga Maret. Selama periode ini, Dusun Sengkuang Daok sering terkena banjir akibat luapan sungai Buayan hingga setinggi satu meter yang menggenangi rumah-rumah warga dan kebun karet mereka yang mengakibatkan kegiatan menyadap karet yang ditanam di dekat sungai terhenti.

Mengatasi Tekanan Lingkungan

Penduduk Sengkuang Daok memanfaatkan biodiversitas hutan untuk mengatasi hambatan-hambatan ekologis di atas. Pada bulan-bulan tertentu warga akan datang ke hutan untuk menebang kayu (*nyingso*) manakala dibutuhkan. Hutan yang ada di sekitar desa Buayan menyediakan komoditas kayu yang bernilai tinggi di pasar seperti kayu *belian* (kayu besi), kayu *pelasik*, dan kayu *dongger* yang biasa digunakan warga untuk membangun rumah. Secara turun-temurun, setiap kepala keluarga memiliki sebidang kebun buah yang diturunkan dari generasi ke generasi yang dinamakan *tembawang* untuk dikonsumsi buah-buahannya sebagai pasokan makanan jika tiba masanya musim buah, seperti durian, cempedak, rambutan, *langsep*, *kembayau*, *jeramun*, *sengkuang*, jeruk purut, jeruk bali, petai, dan jengkol. Buah yang paling umum diambil adalah cempedak karena kulitnya dapat diawetkan hingga 12 bulan jika direndam air garam dalam toples (*dikasam*). Kebun-kebun ini merupakan bekas ladang berpindah yang disebut *bawas* setelah 15-25 tahun dikelola sebagai ladang. Penduduk akan membuang sampah dapur berupa biji-bijian di area ini. Selain itu, di bulan September penduduk akan memburu ikan *tapah* di sungai Buayan menggunakan busur panah, di samping berburu hewan lainnya menggunakan senapan api (*lantak*) di hutan.

Menanam Sawit

Kelapa sawit merupakan komoditas yang relatif baru di Desa Kuala Buayan, sekalipun sudah mendominasi sebagai sumber tanaman dagang utama setelah karet. Pertama warga akan membuka lahan dari hutan dan ladang mereka untuk kemudian ditanami kelapa sawit yang bersifat monokultur. Pohon ini baru bisa dipanen setelah tiga tahun masa tanam. Panennya pun mengikuti jadwal perusahaan yang biasanya dilakukan dua kali setiap bulan per kaplingnya dan tidak tergantung cuaca seperti karet, karena sawit toleran terhadap kekeringan atau banjir. Selama tiga tahun tersebut kelapa sawit membutuhkan pupuk dan herbisida untuk mematikan rumput-rumput liar di sekitar pohon. Meskipun sawit dapat memberikan penghasilan yang pasti, tetapi untuk penduduk yang memiliki kurang dari tiga kapling juga memanfaatkan kebun karet sebagai dualitas penyangga ekonomi rumah tangga dimana kelapa sawit dapat memberikan penghasilan yang lebih banyak dan karet dapat disadap setiap hari jika cuaca mendukung.

Keuntungan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur

Di Dusun Sengkuang Daok, kelapa sawit menjadi simbol kemakmuran dan kemajuan karena membawa perubahan signifikan dalam hal peningkatan pendapatan rumah tangga dan pembangunan infrastruktur. Dibandingkan karet, kelapa sawit menghasilkan laba

yang lebih besar dan kebutuhan tenaga kerja yang lebih sedikit.

Tabel 1. Perbandingan Keuntungan antara Sawit dan Karet (dalam kurun waktu satu bulan).

| Menyadap karet kebun pribadi | Menyadap karet kebun milik orang lain | Panen Kelapa sawit milik pribadi | Buruh panen sawit | Buruh sawit |
|-----------------------------------|---|--|--|------------------------|
| 105 kg x Rp. 7000 = Rp.735.000 | 105 kg x 70% x Rp.7000 = Rp.514.500 | 4 ton x Rp.900.00 = Rp.3.600.000 | 2 kali panen x Rp.300.000 = Rp.600.000 | 1 bulan = Rp.1.350.000 |

Sumber: data lapangan 2019.

Dari tabel di atas terlihat bahwa keuntungan dari memanen sawit per tahun sekitar dua kali lipat lebih besar dibandingkan menyadap getah karet. Input tenaga kerja yang dialokasikan dari memanen sawit juga hanya delapan hari per bulan setiap *kapling*. Sementara itu harga untuk karet memang lebih besar per kilogramnya tetapi hasil getahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sawit, serta membutuhkan waktu 15 hari per bulan untuk mendapatkan hasil maksimal. Harga sawit juga cenderung lebih stabil meskipun terbilang lebih rendah dari pada karet. Ingatan mengenai harga karet yang tinggi di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih melekat dengan penduduk, “Harga karet jaman SBY bisa sampai 22.000 per kilo. Harga sawit pun bisa sampai 2.200 per kilo. Sekarang jaman Jokowi karet cuma 7.000 jak. Coba naik dikit jadi 9.000 pasti sudah cukup buat kebutuhan sehari-hari” (wawancara Bang Yayan, 12 Februari 2019)

Harga sawit meskipun terbilang lebih rendah daripada karet akan tetapi lebih stabil. Keuntungan ekonomi yang lebih besar daripada *noreh* karet mendorong warga untuk menyerahkan lahan mereka kepada perusahaan. Hal ini selaras dengan pandangan pak Rudi, kepala dusun Sengkuang Daok mengenai kelapa sawit sebagai jalan mendapatkan kemakmuran,

“Awal bermulanya sawit di sini, dulu ada yang percaya ada yang *ndak* percaya. Bapak dulu serah lahan lima hektar ke perusahaan, dan sebagai gantinya bapak dapat satu kapling. Dulu pun bapak kerja *noreh* sama gesek (*nebang*) kayu itu pun bapak masih pakai beliung, belum ada gergaji mesin. Setelah bapak dapat kapling, perekonomian membaik. Ya alhamdulillah semenjak perusahaan berdiri, kami masyarakat *ni* bersyukur pendapatan jadi naik dibandingkan dulu, pembangunan bisa sampai sini, orang-orang trans(*migran*) makin banyak pindah ke Kalimantan jadi nambah kenalan dan pengalaman. Begitu lihat perekonomian bapak membaik, tetangga-tetangga yang melihat *tu* jadi ikut serah lahan ke perusahaan karena ingin ekonominya membaik juga.” (wawancara Pak Rudi, 18 Februari 2019)

Rata-rata dari keterangan penduduk, perekonomian membaik dari kerja sama dengan perusahaan berimplikasi pada meningkatnya barang-barang sekunder dan tersier yang dikonsumsi. Selain itu, penduduk mendapatkan ‘gaji tetap’ setiap bulannya yang dapat digunakan untuk berinvestasi pada lahannya dan menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemampuan untuk berinvestasi lebih lanjut ini dipandang sebagai suatu kemakmuran dibandingkan sebelum adanya sawit (Semedi 2014, 381).

Perusahaan BHD di tahun 1990 menawarkan pembangunan jalan poros yang dapat menghubungkan Desa Buayan dengan pasar di Meliau dan juga pembangunan layanan publik lain, seperti sekolah dan Puskesmas. Jalan yang dibangun oleh perusahaan pada 1991 ini berfungsi untuk mengangkut hasil panen dari lahan inti dan plasma menggunakan truk-truk besar serta membuka akses bagi para pekerja transmigran melalui program transmigrasi di masa Orde Baru. Jalan ini melewati berbagai lanskap dari perbukitan hutan sekunder hingga perkebunan monokultur kelapa sawit dan perkebunan agroforesti karet. Jalan ini secara langsung menyediakan akses kepada barang-barang konsumsi dari luar termasuk bahan-bahan pokok, kendaraan bermotor, dan berbagai macam teknologi. Berbagai peralatan modern tersebut menghubungkan penduduk dengan dunia luar yang belum pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Selain itu akses listrik yang dibangun oleh PT. BHD juga membawa perubahan kepada desa yang ditandai dengan meluasnya konsumsi barang elektronik, seperti televisi dan telepon seluler. Selain infrastruktur, kelapa sawit juga membuka berbagai jenis lapangan pekerjaan baru bagi penduduk Sengkuang Daok, antara lain pekerjaan menebang kayu *dongger* untuk perusahaan, perawatan jalan, atau bekerja menjadi buruh tetap pemilik lahan atau buruh lepas yang biasa direkrut oleh pemilik lahan manakala mereka membutuhkan pekerja tambahan, terutama ketika merawat kebun sawit atau waktu panen telah tiba.

Antara Pertimbangan Ekologi dan Ekonomi

Berdasarkan uraian di atas terdapat korelasi antara tekanan lingkungan dengan pilihan warga Sengkuang Daok untuk mengadopsi kelapa sawit. Menurut Thrupp dan Magateli (1999, dalam Finnis 2006, 364) keamanan lingkungan dapat dikonsepsikan sebagai kemampuan ekosistem untuk mendukung ketahanan penghidupan manusia. Seperti yang telah disebutkan di atas, warga Sengkuang Daok memahami keamanan lingkungan dalam konteks pengendalian musim hujan dalam setahun. Pilihan warga untuk mengadopsi kelapa sawit merupakan usaha mereka mengatasi kondisi-kondisi tak menentu akibat deforestasi dan fluktuasi cuaca seperti banjir dan kemarau panjang. Kelapa sawit pun diadopsi bukan karena sifat tanamannya yang dapat terintegrasi ke dalam sistem ladang berpindah akan tetapi karena tidak terpengaruh cuaca dan durasi panen lebih cepat ketimbang karet. Kandati demikian, karet masih dipertahankan sebagai tanaman dagang kedua setelah sawit. Sekalipun tanaman karet punya fleksibilitas terkait lokasi tanam, ketika musim hujan, getah yang bisa diambil hanya sedikit karena wadahnya yang terendam air hujan. Sedangkan untuk kebun karet yang berada di dekat sungai, terkadang tidak bisa diambil getahnya kala banjir. Meskipun begitu, karet juga menjadi jaring pengaman sosial bagi warga yang memiliki sedikit *kapling* dan warga yang tidak memiliki lahan sawit.

Pilihan petani dalam mengadopsi sawit bukan hanya merupakan respons mereka terhadap tekanan lingkungan. Di sini, pandangan Popkin yang menekankan proses pembentukan pilihan dan strategi interaksi individu (1979, 30) menjadi relevan. Saya juga sependapat bahwa, “petani selalu berusaha bukan hanya untuk melindungi tetapi juga menaikkan level subsisten mereka melalui investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek” (Popkin 1979, 4). Dalam hal ini pilihan mengadopsi tanaman dagang tertentu merupakan pilihan rasional yang berhubungan dengan investasi jangka panjang yang dinilai lebih aman dan stabil. Integrasi desa ke dalam pasar nasional atau pasar

internasional dapat dikonsepsikan sebagai respon petani terhadap adanya kesempatan-kesempatan baru, yakni keterbukaan terhadap pasar internasional dan nasional yang menjadikan petani mengalami ketidakpastian baru dan beragam, pasar yang memiliki harga yang lebih stabil, dan memberikan kepastian bahan pangan yang lebih dari waktu ke waktu (Popkin 1979, 33).

Studi saya menunjukkan bahwa sawit merefleksikan aspirasi penduduk Sengkuang Daok untuk menjadi lebih “maju” dan “makmur”. Ide tentang kemajuan dan kemakmuran tersebut didapatkan dari gaya hidup penduduk Kecamatan Meliau di seberang Sungai Kapuas dimana kendaraan bermotor dan peralatan elektronik hanya terlihat di sana sebelum sawit mulai diadopsi. Bagi mereka, contoh gaya hidup yang lebih maju termasuk semakin banyaknya anak-anak yang sekolah, cara berpakaian lebih rapi, atap genting dan seng yang menggantikan daun pelepah, serta lantai rumah berkeramik. Dibangunnya infrastruktur jalan menjadi media masuknya nilai-nilai kemakmuran dan kemajuan yang dianggap sebagai bagian dari modernitas. Pemahaman bahwa kelapa sawit akan membawa kemakmuran dan kemajuan tidak serta merta diterima oleh penduduk setempat.

Ringgo, manajer PT BHD, dalam proses sosialisasi skema NES dijelaskan bahwa keuntungan yang akan diterima ketika warga bersedia menyerahkan lahannya adalah penghasilan besar dan pembangunan infrastruktur berupa jalan dan suplai listrik. Proses sosialisasi ini dilakukan dengan pendekatan ‘ramah’, dalam artian tidak ada unsur paksaan dan warga mempunyai pilihan secara sukarela. Selain itu, perusahaan juga meyakinkan penduduk dengan menularkan nilai kemakmuran dan kemajuan yang ditunjukkan dari para pekerja transmigran. Sekalipun demikian, warga lokal dengan para transmigran memiliki pandangan berbeda terhadap kelapa sawit. Bagi para transmigran, sawit merupakan jalan untuk berwirausaha dan mengakumulasikan kekayaan.

Bang Kalim, seorang transmigran dari Jawa yang mempunyai banyak kaveling, “Bang Kalim merupakan transmigran dari Sunda yang sudah pindah ke Kalimantan semenjak tahun 1990-an. Beliau sudah berkeluarga dan mempunyai satu anak, sementara adiknya Fatimah masih kuliah S2 di Jakarta. Beliau merupakan orang yang terkenal memiliki banyak *kapling* oleh warga Daok karena kepiawaiannya dalam mengurus kebun sawit sehingga dapat menghasilkan banyak uang. Menurutnya, mengurus kebun sawit memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki semua orang. Beliau memiliki sekitar 8 *kapling*. Kalim juga sering terlihat berjualan sayuran dari dusun ke dusun dengan membawa sepeda motor untuk penghasilan tambahan, sekaligus sarana rekreasi untuk bertemu dengan orang-orang.” (wawancara Bang Kalim, 18 Februari 2019).

Cerita sukses orang-orang transmigran lainnya seperti yang dideskripsikan oleh Semedi (2014, 381) ketika seorang karyawan perusahaan memberitahu para petani lokal, “... lihat, pekerja dari Jawa yang berada di Sungai Dekan, mereka mempunyai perekonomian yang bagus, dan mereka hanyalah pekerja kebun, bukan pemilik kebun. Anda bisa perhitungkan berapa keuntungan yang didapat jika Anda menjadi pemilik kebun itu sendiri.”

Nilai-nilai “kemakmuran” dan “kemajuan” ditangkap berbeda oleh petani lokal yang justru menjadi tuntutan untuk hidup layak di zaman yang baru. Hal ini menjadi dorongan sosial bagi warga Daok seperti yang dijelaskan oleh Pak Baun, seorang Melayu dan buruh *singso*,

“Warga sini kalau mau gelar nikahan anak, orang tua akan gelar pesta yang besar, karena malu sama tetangga kalau ndak gelar pesta besar. Untuk gelar pesta itulah, orang tua akan jual kaplingnya atau nyari hutang dulu. Baru-baru ini pun ada orang mau beli mobil, sudah DP 70 juta tapi karena uangnya ndak cukup buat kredit, dijualah kapling. Ternyata itupun belum cukup buat bayar hutang mobil. Kapling pun hilang, mobil pun ndak dapat.” (wawancara Pak Baun, 14 Maret 2019)

Mamak Marisa pun bercerita bahwa ia sempat membeli kredit mobil, namun tahun ini beliau kembalikan karena harga sawit sedang turun. Penghasilan suaminya kini perbulan sekitar enam juta rupiah padahal sebelumnya hampir dua kali lipat sehingga tidak bisa melunasi kreditnya. Dorongan sosial untuk hidup layak bukan hanya terbatas pada membeli barang-barang elektronik, perabotan rumah tangga, dan kendaraan bermotor roda dua yang menjadi barang-barang standar dalam sebuah rumah tetapi juga pada konsumsi berlebihan yang menjadi simbol seseorang “makmur” dan “maju”.

Kesimpulan

Alasan warga mengadopsi sawit dan menggantikan kebun karet serta ladang karena dua hal yakni, pertama budidaya kelapa sawit lebih fleksibel terhadap cuaca dan hasilnya yang lebih cepat dipanen; kedua, pendapatan yang lebih tinggi daripada karet serta pembangunan infrastruktur yang memberi dampak modernisasi. Secara ekologi, petani memiliki pengetahuan lokal bahwa kelapa sawit dapat dipanen baik pada musim hujan maupun musim kemarau dan hasilnya yang bisa lebih cepat diambil daripada karet. Fluktuasi cuaca yang tidak menentu menjadikan karet yang sebelumnya menjadi komoditi utama untuk mendapatkan penghasilan kini tidak terlalu dapat diandalkan terutama saat musim hujan. Hal ini menjadikan karet tidak dapat diambil secara teratur. Gagasan yang muncul dalam pertimbangan petani adalah ‘panen yang lebih cepat’ dan ‘tidak terhalang cuaca’.

Dari sudut pandang ekonomi, kelapa sawit bukan hanya dipandang sebagai batu lonjakan ekonomi akan tetapi juga sebagai sumber ‘uang cepat’ yang berujung pada meningkatnya pola hidup yang lebih konsumtif. Selain itu, dengan menjual hasil panen kelapa sawit, penduduk dapat memperoleh kepastian bahan pangan yang lebih aman dibandingkan mengandalkan kegiatan berladang. Dari segi harga, kelapa sawit membutuhkan perawatan lebih dibandingkan karet, akan tetapi harganya di pasar cenderung lebih stabil sehingga petani merasa lebih aman membudidaya kelapa sawit dibandingkan karet. Adopsi sawit oleh petani juga bukan serta-merta karena pengaruh pasar, namun juga karena dorongan-dorongan sosial untuk hidup layak di zaman yang baru, sebagai pemahaman atas nilai-nilai “kemajuan” dan “kemakmuran” yang didapat warga Daok ketika bertempat tinggal di desa Trans 2. Proses pemahaman tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan agar dapat mengakuisisi lahan milik warga setempat melalui skema NES di samping penawaran akan keuntungan ekonomi dan pembangunan infrastruktur ketika sesi sosialisasi. Hal ini berujung pada pola hidup yang lebih konsumtif dibandingkan sebelumnya.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. 2010. *Laporan Statistik Indonesia 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Laporan Statistik Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Colchester, Marcus, dkk. 2006. *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*. Jakarta: Forest Peoples Programme/Perkumpulan Sawit Watch.
- Colchester, Marcus, dan Chao, Sophie. 2011. *Oil Palm Expansion in Southeast Asia: Trends and Experiences of Local Communities and Indigenous Peoples*. Jakarta: Perkumpulan Sawit Watch.
- Cook, Scott. 1973. "Economic Anthropology: Problem in Theory, Method, and Analysis." Dalam *Pengantar Antropologi Ekonomi*, disunting oleh Sjafrin Sairin, Pujo Semedi, dan Bambang Hudayana. 2002. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dove, Michael R. 1993. "Smallholder Rubber and Swidden Agriculture in Borneo: A Sustainable Adaptation." *Economic Botany* 47 (2): 136-147.
- Dove, Michael R. 1994. "Transition from Native Forest Rubbers to Hevea brasiliensis (Euphorbiaceae) among Tribal Smallholders in Borneo." *Economic Botany* 48 (4): 382-396.
- Elpagar Lembaga Pemberdayaan Pergerakan Rakyat. 2017. "E-Sawit Digitalisasi Persawitan Kabupaten Sanggau." <http://esawit.sanggau.go.id>.
- Feintrenie, Laurene, Chong Wan Kian, dan Levang, Patrice. 2010. "Why do Farmers Prefer Oil Palm? Lessons Learnt from Bungo District, Indonesia." *Small-scale Forestry* 9: 379-396. DOI 10.1007/s11842-010-9122-2.
- Finnis, Elizabeth. 2006. "Why Grow Cash Crops? Subsistence Farming and Crop Commercialization in the Kolli Hills, South India." *American Anthropologist* 108 (2): 363-369.
- Gatto, Marcel, Wollni Meike, dan Matin Qaim. 2015. "Oil Palm Boom and Land-Use Dynamics in Indonesia: The Role of Policies and Socioeconomic Factors." *Land Use Policy* 46: 292-303.
- Kementerian Pertanian. 2018. *Laporan Statistik Pertanian 2018*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kubitza, Christoph, Vijesh V Krishna, Zulkifli Alamsyah, dan Matin Qaim. 2018. "The Economics Behind an Ecological Crisis: Livelihood Effects of Oil Palm Expansion in Sumatra, Indonesia." *Human Ecology* 46 (1): 107-16. <https://doi.org/10.1007/s10745-017-9965-7>.
- Laney, Rhena, dan Turner B.L. 2015. "The Persistence of Self-Provisioning Among Smallholder Farmers in Northeast Madagascar." *Human Ecology* 43: 811-826. DOI: 10.1007/s10745-015-9791-8
- Laris, Paul, dan Jeremy D Foltz. 2014. "Cotton as Catalyst? The Role of Shifting Fertilizer in Mali's Silent Maize Revolution." *Human Ecology* 42 (6): 857-72. <https://doi.org/10.1007/s10745-014-9694-0>
- Lesley, Potter, dan Badcock Simon. 2017. "Can Indonesia's complex agroforests survive globalization and decentralization? Sanggau District, West Kalimantan." Dalam

- Environment, Development, and Change in Rural Asia-Pacific: Between Local and Global*, disunting oleh John Connel dan Eric Waddel (ed.). 2007. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Lesley, Potter. 2005. "Commodity and Environment in Colonial Borneo: Economic Value, Forest Conversions and Concern for Conservation, 1870-1940." Dalam *Histories of the Borneo Environment: Economic, Political, and Social Dimensions of Change and Continuity*, oleh Wadley Reed L (ed). 2005. Leiden: KITLV Press.
- Li, Tania Murray. 2015. *Social Impacts of Oil Palm in Indonesia: A Gendered Perspective from West Kalimantan*. Centre for International Forestry Research (CIFOR). DOI: 10.17528/cifor/005579
- Mertz, Ole, Kelvin Egay, Thilde Bech Bruun, and Tina Svan Colding. 2013. "The Last Swiddens of Sarawak, Malaysia." *Human Ecology* 41 (1): 109–18. <http://www.jstor.org/stable/23353205>.
- Netting, Robert M, M Priscilla Stone, dan Glenn D Stone. 1989. "Kofyar cash-cropping: Choice and change in indigenous agricultural development." *Human Ecology* 17 (3): 299–319. <https://doi.org/10.1007/BF00889021>.
- Popkin, Samuel. 1979. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press
- Sairin, Sjafrin, Pujo Semedi, dan Bambang Hidayana. 2002. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Semedi, Pujo, dan Laurens Bakker. 2014. "Between Land Grabbing and Farmers' Benefits: Land Transfers in West Kalimantan, Indonesia." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 15 (4): 376-390. DOI: 10.1080/14442213.2014.928741
- Sirait, Martua. 2009. *Indigenous Peoples and Oil Palm Plantation Expansion in West Kalimantan, Indonesia*. Working Papers, World Agroforestry Centre, Library Department.